

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KEPEGAWAIAN

SPD2 LS



BUDAYA KERJA BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Harmonis Kami saling peduli dan mengharga

Loyal dan mengutamakar kepentingan bangs

Akuntabel Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

Adaptif
Kami terus berinovasi dan
antusias dalam menggerakan

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten ataupun menghadap

Berorientasi Pelayanan

Kolaboratif Kami membangun kerja sama





Jl. K.H. Abdul Halim No. 107 Majalengka **Kode Pos 45418** Telp. (0233) 281366/WA 085349999366 bkpsdm@majalengka.go.id



















(h (a) (b) (h

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Standar Operasional	23/SOP/BKPSDM-MJL/X/2023
Tanggal Pembuatan	02 Oktober 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Mei 2024
Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
	Rengembangan Sumber Daya Manusia BADAN KEPEGAWALWA DAN PENGEMBANG SUMBER DAYA MALVISIA H. Gatot Sulaeman, AP., M.Si. NIP. 19760528 199412 1 001
Nama Standar Operasional	Pengajuan SP2D LS
Prosedur	

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. PA
 - a. Mampu mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki ketelitian;
 - c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
- 2. PPKD/BUD
 - a. Mampu mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki ketelitian;
 - c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
- 3. PPK-SKPD
 - a. Mampu mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki ketelitian;
 - c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
- 4. PPTK
 - a. Mampu mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki ketelitian;
 - c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.
- 5. Bendahara
 - a. Mampu mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki ketelitian;
 - c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.

Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pengajuan SP2D LS tidak akan berjalan dengan optimal	Database Komputer					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :					
DEDINGAMAN	4. ATK.					
	3. Tinta Printer;					
	2. Printer;					
SOP Pengajuan SP2D GU US	1. Komputer;					
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:					
	c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.					
	a. Mampu mengoperasikan komputer; b. Memiliki ketelitian;					
	8. Penyedia Barang-Jasa/Pegawai					
	c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.					
	b. Memiliki ketelitian;					
	a. Mampu mengoperasikan komputer;					
	7. KASDA					
	c. Memiliki orientasi pelayanan yang baik.					
	b. Memiliki ketelitian;					
	a. Mampu mengoperasikan komputer;					
	6. PPKD/BUD					

(a) (b) (b)

1 (x, (h)

URAIAN PROSEDUR SOP / FLOWCHART PENGAJUAN SP2D LS

	Uraian Kegiatan	Pelaksana										
No.		PPK	PPTK	Bendahara	PPK-SKPD	PA	PPKD/BUD	KASDA	Penyedia Barjas/Pegawai	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksanaan Pengadaan Langsung atau Lelang									- DPA - SPD - Dokumen	1-20 hari	- SPK - SP
2	- Pengajuan SPP LS Gaji - Pengajuan SPP LS Barjas									- Salinan SPD - SPP LS Gaji/Barang/Jasa (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP- LS) - SSP - SP/kontrak antara PA dg Pihak Ketiga dg mencantumkan no rek. Bank pihak ketiga - BA penyelesaianpekerjaan - BA serah terima barang/jasa - BA pembayaran - Kuitansi dan kelengkapannya	1 hari	- SPP LS gaji - SPP LS Barang/jasa
3	- Pengajuan SPP LS Gaji - Pengajuan SPP LS Barjas			•						- Salinan SPD - SPP LS Gaji/Barang/Jasa (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP- LS) - SSP - SP/kontrak antara PA dg Pihak Ketiga dg mencantumkan no rek. Bank pihakketiga - BA penyelesaianpekerjaan - BA serah terima barang/jasa - BA pembayaran - Kuitansi dan kelengkapannya	1 hari	- SPP LS gaji - SPP LS Barang/jasa
4	Memverifikasi SPP dan SPJ dengan kelengkapannya									- Salinan SPD - SPP LS Gaji/Barang/Jasa (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian SPP- LS) - SSP - SP/kontrak antara PA dg Pihak Ketiga dg mencantumkan no rek. Bank pihakketiga - BA penyelesaianpekerjaan - BA serah terima barang/jasa - BA pembayaran - Kuitansi dan kelengkapannya	1 hari	- SPP LS gaji - SPP LS Barang/jasa

5	Penolakan penerbitan SPM	L	-		aturan - SPJ serta sesuai dg - SPP dan - SPM	kelengkap/tidak sesuai kelengkapannya tidak aturan yg berlaku 1 hari lampiran kelengkapannya	- Surat penolakan SPM
6	Penandatanganan SPP dan pengusulan penerbitan SPM	I			- SPM	lampiran kelengkapannya 1 hari	- SPP - SPM
7	Pengusulan SPM				- SPM	lampiran 1 hari kelengkapannya	- SP2D
8	Penerbitan SP2D			-	Neraca Sa	ldo 1 hari	- SP2D
9	Pencairan SP2D			-	- SSP	1 hari	- SP2D
10	Penerimaan biaya anggaran kegiatan				- SSP	1 hari	- SP2D